

RANHIR

RENJA

RENCANA KERJA 2023



**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



Jl. Prabu Gajah Agung No.9 Telp. (0261) 201354 Fax. (0261) 201354
Email.bappenda.sumedang@gmail.com/https://bappenda.sumedangkab.go.id
SUMEDANG 45323

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN SEMESTER 1 TAHUN 2022.	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ...	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	33
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.....	34
3.3 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Sumedang.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	42
BAB V PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Sumedang	12
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
TABEL 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	26
TABEL 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	32
TABEL 3.1	Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sumedang.....	37
TABEL 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Lamp V. RKPD 2022.....	43

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	22
---------	---	----

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pelaksanaan tugas pokok pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang serta memberikan gambaran tentang sasaran dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran dan rencana target kinerja dengan indikator yang ingin dicapai pada tahun 2023 disertai dengan indikasi pendanaannya. Dengan Rencana kerja ini, Kami berharap dapat dijadikan kerangka acuan bagi seluruh komponen khususnya pimpinan dan pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kegiatan menuju tercapainya Visi dan Misi Badan pada khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya.

Sumedang, 28 Juli 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



ROHANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19730315 199303 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/LINTAS Perangkat Daerah
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4355)
 5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 11. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomo 4576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Jabar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat)
40. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
43. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
47. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;
48. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018;
49. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
50. Pearuran Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;
51. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
52. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besardalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
53. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2023 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rumusan kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

- a. Sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- b. Merumuskan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 SEMESTER I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (disajikan dalam Tabel 2.1)

- a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Belanja Modal
- b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor penyebab tidak tercapainya
- c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan
 - 2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 SEMESTER I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021, pelaksanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Belanja Pegawai (Pegawai, TPP dan Insentif) sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 di alokasikan Sebesar Rp. 9.149.612.447,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 8.069.727.766,00 (88,20 %)
2. Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menerima alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.783.347.603,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 37 (tiga puluh

tujuh) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 10.234.004.527,00 (94,91 %)

3. Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 di alokasikan sebesar Rp. 499.316.497,00 dan terealisasi sebesar Rp. 495.305.800,00 (99,20 %). Disajikan dalam Tabel 2.1 (terlampir).

4. **Realisasi Semester 1 Tahun 2022**

Sedangkan untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan Parsial I Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran mencapai sebesar Rp18.486.518.366,00 terdiri atas 2 Program, 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 maupun perkiraan capaian Tahun Anggaran 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Target dan Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang hampir sebagian besar memenuhi target.

c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu capaian kinerja program/kegiatan tidak ada yang melebihi target. Semua program/kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah terealisasi sesuai dengan target yang ada.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

1. Masih Terdapat Usulan Kegiatan yang Setelah Diinventarisasi Belum Sesuai Dengan Rencana Kegiatan yang Telah Dicanangkan Pada Renstra maupun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Belum Didukung Dengan Ketersediaan Data-Data Yang Memadai dan Sistem Kerja Stakeholder Pendukung Secara Optimal, Sehingga Berpengaruh Terhadap Kualitas Penyusunan Hasil Kajian.

3. Masih Kurangnya Pemenuhan Akan SDM Aparatur Pendapatan yang Berkualitas. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023,
 - e. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;** Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .
 - f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 1. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
 2. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Baik, Berkualitas dan Sistematis; dan
 3. Menyediakan Kebutuhan Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan Yang Akurat. Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pemenuhan Manajemen Kebutuhan Kantor;
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian/Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan Daerah; dan
 - c. Menyusun Kajian-Kajian Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data Informasi Pembangunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 195 tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;
- b. Penyelenggaraan pendapatan dan pelayanan umum meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengendalian operasional, pengelolaan PBB dan BPHTB, pengelolaan pajak lainnya, non pajak, pengendalian dan pembinaan;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum;

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara Internal meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pajak, non pajak, pengendalian dan pembinaan, pembinaan teknis fungsional pendapatan daerah dan pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur;
 - c. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - f. menyelenggarakan analisa potensi pendapatan daerah;
 - g. mengendalikan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - i. mengendalikan dan mengevaluasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - j. mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. membina dan mengevaluasi pencapaian target pajak daerah skala kabupaten;
 - l. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah;
 - m. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan di bidang pendapatan Daerah dengan Instansi atau pihak lainnya yang terkait;
 - n. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Daerah
 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan ;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 3. Kepala Jabatan Fungsional

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Sekretaris.

Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan Pendapatan Daerah;

- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur layanan Badan Pendapatan Daerah dan pada lingkup sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Pendapatan Daerah;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan Pendapatan Daerah;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan Pendapatan Daerah;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pendapatan Daerah;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan Pendapatan Daerah; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang perencanaan dan pengembangan;
 - c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Merumuskan penyusunan rencana pendapatan daerah
 - g. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - k. menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan pihak terkait dalam perumusan dan penyelenggaraan teknis kebijakan pendapatan daerah
 - l. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - m. merumuskan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
 - n. merumuskan strategi pengembangan pengelolaan pendapatan daerah
 - o. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja dilingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi pajak daerah dan retribusi daerah
- e. menyelenggarakan pendataan, penilaian, pemutakhiran dan evaluasi pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan koordinasi pajak daerah dan retribusi daerah
- g. merumuskan pengelolaan data objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah
- h. menyelenggarakan penelitian dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. merumuskan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

(4) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah.

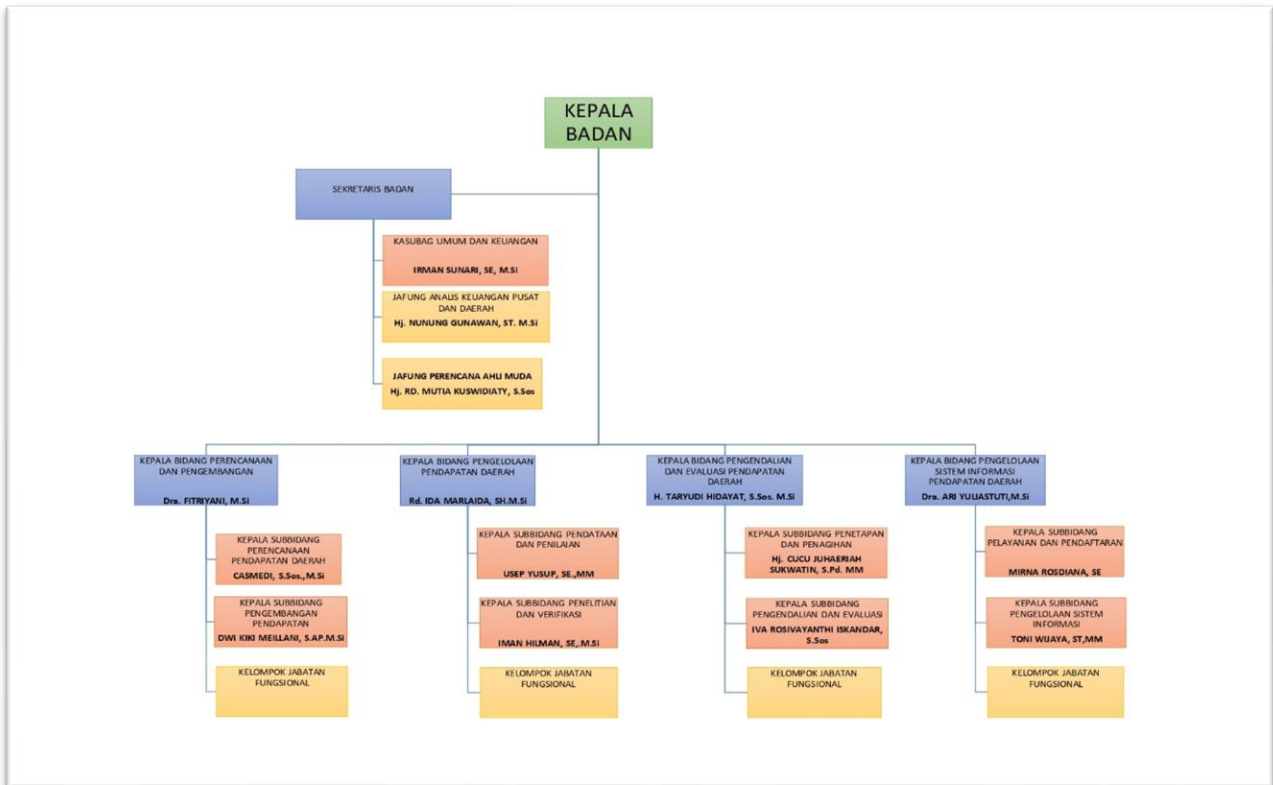
Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk/pedoman teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian implementasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan pajak daerah dan
 - h. retribusi daerah kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
 - k. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - m. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan penertiban pajak daerah
 - n. menyelenggarakan proses keberatan dan banding, pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah
 - o. menyelenggarakan proses restitusi dan kompensasi Pajak Daerah
 - p. menyelenggarakan penetapan pajak daerah dan penagihan piutang Pajak Daerah
 - q. menyelenggarakan fasilitasi penyitaan objek Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
 - r. melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pelaporan pendapatan daerah;
 - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya
- (5) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. merumuskan kebijakan teknis pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- e. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- f. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. merumuskan pedoman teknis tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- k. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan basis data pajak daerah
- l. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan data dan informasi Pendapatan Daerah;
- m. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah
- n. menyelenggarakan pelayanan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah
- o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021



Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang disajikan dalam tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan sebagai berikut :

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah instansi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sumedang terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan. Kondisi pendapatan daerah sangat menentukan berbagai kemungkinan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut, sehingga permasalahan yang timbul perlu diambil langkah langkah yang nyata dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sektor penerimaan yang potensial namun belum optimal diupayakan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan terutama dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut Badan Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang upaya dimaksud antara lain :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah utama dalam pelaksanaan kegiatan, tanpa perencanaan yang baik suatu organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas. Salah satu permasalahan dalam perencanaan penganggaran adalah belum adanya indikator yang jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan kegiatan terutama terkait dengan korelasi antara tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja Perangkat Daerah.

2. Aspek Pendapatan Daerah

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama masih minimnya wajib pajak yang mau melakukan pembayaran secara langsung dan menghitung secara *self assessment*. Hal tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum berfungsinya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) sebagai aparat penegak hukum bagi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih menjadi kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu kemampuan sumber daya manusia pengelola pendapatan perlu terus ditingkatkan

agar mampu menganalisis sumber-sumber potensi pendapatan daerah. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan dengan proporsi terbesar terhadap APBD. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan perlu terus ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta akurasi data potensi pendapatan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah, Dana Tunjangan Profesi Guru dan Dana Desa perlu terus ditingkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah.

3. Isu – isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan serta belum adanya tenaga administrasi pemeriksa pajak;
2. Penanganan piutang pajak yang belum optimal;
3. Belum dilakukan pemutakhiran data sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak;
4. Kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah belum optimal serta ;
5. ketaatan Wajib Pajak masih belum optimal.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang melakukan beberapa strategi untuk mengatasi isu-isu dimaksud dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RKPD Tahun 2023.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang , diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya layanan pajak;
2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;
3. Belum adanya dukungan sistem yang terintegrasi
4. Kualitas layanan pendataan masih rendah;

5. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur;
 6. Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian;
 7. Belum Optimalnya pemuktahiran data potensi pajak daerah;
 8. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah;
 9. Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah;
 10. Belum dilakukan penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar;
 11. Ketersediaan data piutang yang tidak valid;
 12. Belum adanya sistem terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi;
 13. Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak.
 14. Masih kurangnya ketersediaan jumlah SDM;
 15. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik;
 16. Pembayaran pajak belum tepat waktu;
 17. Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 18. Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang;
 19. Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
- Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan pada fungsi pendapatan adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang adalah misi ke 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang yaitu Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggung Jawab secara Profesional dalam Pelayanan Masyarakat Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
1. Belum tersedianya regulasi terkait pengadaan tenaga fungsional untuk pemungutan pajak daerah;
 2. Bagi hasil pajak dan non pajak yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 3. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola pelayanan perizinan terkait potensi pajak daerah
 4. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak daerah seperti Legal Drafter, Penilai PBB, Pemeriksa Pajak, Pemetaan, Juru Sita Pajak, dan lain-lain;
 5. Masih kurangnya ketersediaan jumlah SDM;
 6. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik;
 7. Belum optimalnya pemanfaatan website sebagai media informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik yang telah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak;
 8. Pembayaran pajak belum tepat waktu;
 9. Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 10. Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok Kabupaten Sumedang;
 11. Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah;
 12. Masih rendahnya kontribusi Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagai salah satu sumber peningkatan PAD selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Masih rendahnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam mendukung peningkatan PAD.

Sedangkan beberapa peluang bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, antara lain:

1. Pemantauan dan pemeriksaan pajak daerah secara berkala;
2. Melakukan verifikasi lapangan;
3. Melakukan analisa zona nilai tanah (ZNT) dan nilai indikasi rata-rata (NIR);
4. Melakukan pendaftaran dan pendataan calon wajib pajak;
5. Penyusunan produk hukum;
6. Koordinasi dengan daerah lain mengenai penyusunan Produk hukum;

7. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi penegak hukum;
 8. Koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah mengenai penyusunan produk hukum;
 9. Identifikasi data piutang PBB P2;
 10. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
 11. Penyempurnaan dan identifikasi peta PBB P2;
 12. Penyempurnaan sistem informasi;
 13. Menyelenggarakan pelatihan teknis terkait pemungutan pajak daerah;
 14. Mengikutsertakan diklat fungsional teknis yang diselenggarakan Pusdiklat Pajak;
 15. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan KEMENDAGRI, KEMENKEU, PROVINSI;
 16. Pembayaran pajak secara online;
 17. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
 18. Melakukan sosialisasi pajak daerah;
 19. Pengelolaan website resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- e. **Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.**
1. Merumuskan Kapasitas Perencanaan serta Program dan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah
 2. Peningkatan Pelayanan dan Informasi Pajak yang transparan dan berkualitas
 3. Memperluas Basis Data Potensi Penerimaan Pajak Daerah
 4. Mengoptimalkan Proses Pemungutan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah
 5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

a. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan Hasil Kebutuhan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2023, memuat program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing Perangkat Daerah masih memungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Adapun perbandingan antara RKPD 2023 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sesuai Tabel 2.3 sebagai berikut :

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Rancangan hasil analisis kebutuhan disesuaikan dengan Rancangan awal RKPD Tahun 2023.(sesuai dengan tabel 2.3)

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

Proses yang dilakukan antara rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 diambil melalui jalur partisipatif yaitu melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten dan rapat intern bidang-bidang pada Badan Pendapatan Daerah dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023. Rekapitulasi usulan program/kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD hingga dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah, disajikan dalam tabel 2.4 di bawah ini.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
BADAN PENDAPATAN DAERAH s/d TAHUN 2020
KABUPATEN SUMEDANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM AKHIR PERIODE (RENSTRA SKPD) TAHUN 2018/2023	REALISASI TARGET KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3)2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN n-1) 2022	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN					
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2)2021	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
01	03	01	16	036	Pengadaan Alat Perekam Transaksi di Wajib Pajak	Jumlah Alat Perekaman Transaksi di Wajib Pajak	45	45	-	-	-	-	45	1
				038	Pendataan PBB	Jumlah Desa yang didata	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000	1
				045	Intensifikasi Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Pajak Lainnya	7	7	-	-	-	-	7	1
				049	Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa	Jumlah Dokumen Perhitungan dan Aturan Kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa	6	6	-	-	-	-	6	1

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM AKHIR PERIODE (RENSTRA SKPD) TAHUN 2018/2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3)2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN n-1) 2022	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2)2021	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	050	Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12	12	-	-	-	-	12	1
	051	Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pendapatan Daerah	1	1	-	-	-	-	1	1
	052	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pendapatan Daerah	Jumlah Dok	4	4	-	-	-	-	4	1
	053	Pemberian Penghargaan Bidang Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data Penilaian Wajib Pajak, Penggerak Taat Pajak, Kecamatan, Desa dan Kelurahan Berprestasi	1	1	-	-	-	-	1	1
	056	Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, DBH Provinsi dan DBH Pusat	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah, DBH Provinsi dan DBH Pusat	12	12	-	-	-	-	12	1
	057	Penyampaian SPPT PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak	804260	804260	-	-	-	-	804.260	1
	058	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Pajak	6	6	-	-	-	-	6	1

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM AKHIR PERIODE (RENSTRA SKPD) TAHUN 2018/2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (n-3)2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN n-1) 2022	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA SKPD TAHUN (n-2)2021	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (n-2) 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	061	Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan PBB	Jumlah Desa/Kelurahan	277	277	-	-	-	-	277	1
	062	Optimalisasi Realisasi PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 (buku 1,2,3 dan Buku 4,5)	6	6	-	-	-	-	6	1
	063	Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah System (dok)	4	4	-	-	-	-	4	1
	065	Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan P2	Jumlah Cetak SPPT	900000	900000	-	-	-	-	900.000	1
	066	Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak	12000	12000	-	-	-	-	12.000	1
	068	Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak	12000	12000	-	-	-	-	12.000	1
	069	Perekaman Data Objek Subjek Pajak PBB	Jumlah Wajib Pajak	20000	20000	-	-	-	-	20.000	1

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR SASARAN	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	-	17,77	18,99	17,77	18,99	15,96	-	20,29	21,67	

NO	INDIKATOR PROGRAM	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ADUM											
1	Nilai SAKIP	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	30,86	32,68	-	-	-	-	
	URUSAN											
1	Persentase Potensi Pajak Daerah	-	-	80	85	85	90	15,96	-	85	90	

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN SUMEDANG

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN				36.520.300.000					25.295.058.116
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappenda	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan		26.166.300.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappenda			15.175.738.116
2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda		100%	236.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda		100%	226.219.750
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	21.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.531.440
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.748.260
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	34.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.623.290
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	13.316.760
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	105.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	105.000.000
2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappenda			20.145.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappenda			10.404.518.366
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	20.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	10.259.518.366

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.000.000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	14 Laporan	120.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	14 Laporan	120.000.000
2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappenda			105.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappenda			60.000.000
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	60.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	60.000.000
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	5 Orang	-
2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappenda			1.977.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappenda			1.967.000.000
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	550.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	550.000.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	75.000.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	250.000.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	500.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	500.000.000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	18.000.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	500.000.000
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	74.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	74.000.000
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	-
2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappenda			950.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappenda			200.000.000
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	125.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	-
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	475.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000
2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda			1.918.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda			1.918.000.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.668.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.668.000.000
2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda			835.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda			400.000.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	300.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100.000.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	360.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda	Persentase Potensi Pajak Daerah	90%	10.354.000.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda	Persentase Potensi Pajak Daerah	90%	10.119.320.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	11 Dokumen	10.354.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	11 Dokumen	10.119.320.000
01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	102.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	200.000.000
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	700.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	900.000.000
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98 Unit	1.000.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98 Unit	544.000.000
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	1.500.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	1.010.755.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1.000.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1.890.000.000
07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	1000 Obyek Pajak	280.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappenda	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	1000 Obyek Pajak	117.565.000
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	250.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	147.000.000
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	90.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	500.000.000
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3000 Dokumen	200.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3000 Dokumen	163.000.000
11	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	4.000.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.825.000.000
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	200.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	56.000.000
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18 Dokumen	482.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18 Dokumen	358.000.000
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bappenda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	158.000.000
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	200.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100000000
			JUMLAH TOTAL		36.520.300.000					25.295.058.116

TABEL 2.4
USULAN PRORAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023
KABUPATEN SUMEDANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam (empat) tahapan : RPJMN Pertama tahun 2004-2009, RPJPN Kedua Tahun 2010-2014, RPJMN Ketiga tahun 2015-2020, dan RPJMN Keempat tahun 2020-2024.

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif ”

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2023, Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 tidak mendukung secara langsung prioritas prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kabupaten Sumedang yaitu penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah, maka dukungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi pengelolaan pendapatan daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Selaras dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat dengan berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang optimal.

Hal tersebut dapat digambarkan dengan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel serta dapat memberikan pelayanan yang optimal.

Untuk dapat mencapai pengelolaan pendapatan yang optimal serta memberikan pelayanan sebagaimana harapan masyarakat, dibutuhkan pegawai yang tidak hanya cakap dalam bidangnya akan tetapi juga memiliki integritas moral yang baik. maka disusunlah Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu :

TUJUAN :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan Daerah.

SASARAN :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan mengelola Pendapatan Daerah.

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan diselaraskan pada Misi serta strategi dan kebijakan.

3.3 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya bertujuan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah keseluruhan. Sesuai dengan tupoksinya, salah satu indikator yang menjadi ukuran tingkat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat dilihat pencapaian target Pendapatan Daerah.

Selain merealisasikan target pendapatan daerah Badan Pendapatan Daerah juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023.

Berbagai upaya yang telah dan akan terus dilaksanakan diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan piutang pendapatan dari seluruh jenis pajak.

b. Pencapaian SDGs

1. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah
2. Peningkatan Penegakan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah

c. Pengentasan kemiskinan

Prioritas nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada tiga strategi penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta penguatan karakter dan kebudayaan. Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

d. Pencapaian NSPK dan SPM

Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital sedangkan Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan keamanan siber.

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

f. Pengembangan daerah terisolir

Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah Pemerataan Wilayah dilaksanakan untuk menjamin seluruh wilayah: (1) mendapatkan akses infrastruktur yang layak, berkelanjutan, dan terjangkau; (2) menjamin keterhubungan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik; serta (3) mendorong percepatan dan pemerataan kualitas akses dan optimalisasi pemanfaatan TIK.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan 2 Program, 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan prioritas yang dilaksanakan tahun 2023 sebagai berikut :

PROGRAM :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

KEGIATAN :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

SUB KEGIATAN :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
12. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
13. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
22. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
23. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24. Pengadaan Aset Tak Berwujud
25. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
30. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
31. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
32. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
33. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
34. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
35. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
36. Penetapan Wajib Pajak Daerah
37. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
38. Penagihan Pajak Daerah
39. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tersebar di 26 Kecamatan.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Pada Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran mencapai sebesar Rp25.295.058.116,00 terdiri atas 2 Program, 8 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan, dengan estimasi capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100,00 % serta tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya**

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD sedangkan untuk pagu indikatif tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Sumedang.

- d. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33**

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02	KEUANGAN										26,362,119,342		28,233,000,000				
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										16,242,799,342		15,845,000,000			
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										226,219,750		385,000,000		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	11,531,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	30,000,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	10,748,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	40,000,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	10,623,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	35,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	13,316,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	30,000,000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	2 Laporan	7 Dokumen	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	150,000,000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,471,579,592					10,565,000,000
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	58 Orang/Bulan	3 Laporan	11,326,579,592	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	10,400,000,000
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	12 Dokumen	3 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	35,000,000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 %	14 Laporan	3 Laporan	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang - undangan	100 %	130,000,000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								105,000,000					160,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		100 %	12 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	60,000,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai		100 %	1 Orang	4 Dokumen	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	100,000,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,967,000,000			2,067,000,000			
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	4 Paket	8 Dokumen	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	550,000,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	4 Paket	8 Dokumen	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	175,000,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	4 Paket	8 Dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	250,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	4 Paket	8 Dokumen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	500,000,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	4 Dokumen	8 Dokumen	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	18,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	4 Laporan	8 Dokumen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	500,000,000
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai		100 %	12 Dokumen	8 Dokumen	74,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	74,000,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							200,000,000			200,000,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	1 Unit	1 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	200,000,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,918,000,000			1,968,000,000					
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100 %	12 Laporan	2 Dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	300,000,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai		100 %	12 Laporan	2 Dokumen	1,668,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	1,668,000,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					355,000,000			500,000,000					
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	72 Unit	2 Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	400,000,000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai		100 %	20 Unit	2 Dokumen	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	100,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					10,119,320,000			12,388,000,000					
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					10,119,320,000			12,388,000,000					
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	4 Dokumen	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	300,000,000
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	6 Dokumen	100 %	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	1,500,000,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	1 Laporan	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	250,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	98 Unit	100 %	544,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	595,000,000
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	10 Laporan	100 %	1,010,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	1,200,000,000
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Baisi Data Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	12 Laporan	100 %	1,890,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	2,200,000,000
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	1000 Obyek Pajak	100 %	117,565,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	300,000,000
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	12 Dokumen	100 %	147,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	147,000,000
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	11 Layanan	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	700,000,000
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	3000 Dokumen	100 %	163,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	265,000,000
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	12 Dokumen	100 %	3,825,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	4,000,000,000
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	1 Dokumen	100 %	56,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	56,000,000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	18 Dokumen	100 %	358,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	425,000,000
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	1 Laporan	100 %	158,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	250,000,000
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Cakupan Regulasi Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) yang Relevan		85 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	200,000,000
TOTAL									26,362,119,342					28,233,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun berjalan ini telah memiliki rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukungnya peningkatan pada badan pengelolaan pendapatan daerah untuk lebih jelasnya rencana kerja dan perangkat daerah di tuangkan kedalam tabel 4.1 :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan 2 Laporan	100 %	115,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	120,000,000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							114,000,000					60,000,000	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	99,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	40,000,000
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 %	20,000,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,230,440,892					1,940,000,000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	640,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	500,000,000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	75,000,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	250,000,000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	596,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	500,000,000
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	25,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	492,645,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	350,000,000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	40,000,000
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	200,000,000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							777,000,000						1,075,000,000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	277,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	475,000,000
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	3 Unit	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	600,000,000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,656,480,000						410,000,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	207,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	250,000,000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	1,449,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	160,000,000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,034,567,200						1,225,000,000
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	284,567,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	300,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	75,000,000	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	650,000,000	
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	200,000,000	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								7,411,185,100						11,449,000,000
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								7,411,185,100						11,449,000,000
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Dokumen	100 %	66,111,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	65,000,000	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Dokumen 2 Dokumen	100 %	629,164,451	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	700,000,000	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	160 Orang	100 %	83,704,489	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	150,000,000	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Yang Dipelihara	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	88 Buah	100 %	710,305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	1,320,000,000	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak daerah Yang Terdata dan Terdaftar	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	43100 Wajib Pajak	100 %	818,199,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	2,000,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Subjek Pajak Daerah Dalam Sistem	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	6000 Berkas	100 %	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	1,000,000,000
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penilaian PBB P2	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	2 Laporan	100 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	289,000,000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang di tetapkan	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	9 Jenis Pajak Daerah	100 %	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	250,000,000
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah laporan pelayanan pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	12 Laporan	100 %	302,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	900,000,000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Laporan Penertiban Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	9 Laporan 6 Laporan	100 %	3,401,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	4,300,000,000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Potensi Pajak Daerah	Jumlah laporan Pemeriksaan Pajak daerah Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan Pajak daerah	Tercapainya Penerimaan Realisasi Pendapatan	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	6 Laporan 12 Laporan	100 %	375,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Potensi Pajak Daerah	85 %	475,000,000
TOTAL									32,746,692,680					36,454,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD sedangkan untuk pagu indikatif tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD dikarenakan disesuaikan dengan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Sumedang.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan Kewenangan
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumedang, 28 Juli 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



ROHANA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19730315 199303 1 005